

**ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP EKSPLOITASI
PENAMBANGAN PASIR GOLONGAN C DI DESA
JULUKANAYA KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pada
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUPRIANTO

NIM: 30600113004

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Suprianto

NIM : 30600113004

Tempat/Tgl. Lahir : Cambaya / 08 september 1995

Jurusan/Prodi : Ilmu Politik

Fakultas/Program : Ushuluddin, FilsafatdanPolitik/ Strata 1 (S1)

Alamat : Cambaya

Judul :ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP
EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR GOLONGAN C
DI DESA JULUKANAYA KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibua toleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 28 November 2017

Penyusun,



Suprianto

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR GOLONGAN C DI DESA JULUKANAYA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA”. Yang disusun oleh SUPRIANTO, Nim: 30600113004, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 november 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 November 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si, Ph.D	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Syahrir Karim, M.Si, Ph.D	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, MA	(.....)
Pembimbing II	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.SI	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA

NIP: 19590704 1989031 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, pemilik segala sesuatu yang kepadanya kita sebagai hambanya akan menghadapkan amal yang dilakukan selama berada di dunia fana ini. Kasih dan sayang Allah swt untuk manusia sebagai makhluk yang paling istimewa diantara semua makhluk yang diciptakan semata-mata untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Allah swt pula yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga kita dapat menjalani hidup seperti sekarang ini, maha suci Allah swt atas segala rahmatnya. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad saw yang karena perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan moral dan etika, beliau juga sebagai pahlawan yang revolusioner ditengah krisis kepemimpinan dimasa suram umat manusia pada zamannya. Semoga Allah swt meridhoinya dan merahmati segala perjuangan dan pengorbanan beliau untuk agama dan era yang cerah bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu penulis selama ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Natsir, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Syahrir Karim, M.Si. Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, M.Ag dan Ibu Ismah Titah Ruslin, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan ide kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Muh Ramli, M.Si dan Bapak Syahrir Karim, M.Si. Ph.D sebagai penguji I dan penguji II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Terutama dan Teristimewa kepada Ayahanda Manai dan Ibunda Saniwati tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian dan motivasi dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulis sampai sekarang ini.

8. dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah mencurahkan ilmunya tanpa pamrih serta motivasi, nasihat, dan pelayanannya selama penulis dalam perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan fasilitas dan membantu menyediakan referensi selama masa perkuliahan dan pembuatan skripsi.
10. Terutama dan Teristimewa kepada Ayahanda Manai dan Ibunda Saniwati tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian dan motivasi dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulis sampai sekarang ini.
11. Kepada saudara seperjuangan terutama kelas 1 dan 2 Ilmu Politik 2013 yang selalu ada selama kurang lebih empat tahun. Dan saudara yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan bantuannya kepada penulis selama menempuh perkuliahan bahkan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala dukungan dan bantuan semua pihak mendapatkan pahala dari Allah swt. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Samata, 02 Oktober 2017



Suprianto
NIM. 30600113004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Eksploitasi	19
B. Elite.....	24
C. Rent Seeker.....	27
D. Kerangka konseptual.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Subjek/objek penelitian	31
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Kabupaten Gowa	38
2. Desa Julukanaya	41
B. Gambaran Singkat Tentang Penambangan Pasir di Kabupaten gowa.....	48

C. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya	50
D. Faktor Penyebab Penmbangan Pasir Golongan C Masih Tetap Berlangsung.....	53
1. Adanya Politik Klan dan basis-basis keluarga pada proses penambangan pasir golongan c	53
2. Penambanga Pasir Sebagai Praktek Pemburuan Rente ...	57
3. Upaya Pemerintah	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Suprianto

NIM :30600113004

Judul : EKONOMI POLITIK TERHADAP EKSPLOITASI
PENAMBANGAN PASIR GOLONGAN C DI DESA
JULUKANAYA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN
GOWA

Skripsi ini membahas tentang ekonomi politik terhadap penambangan pasir golongan c di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Selanjutnya dapat dirumuskan sub masalah yaitu: 1). Bagaimana dampak eksploitasi yang dilakukan dalam proses penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya? 2). Faktor apa yang menyebabkan bisnis penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya sulit untuk dihilangkan? Adapun tujuan penelitian yaitu 1) Mengetahui Bagaimana dampak eksploitasi yang dilakukan dalam proses penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya. 2) Mengetahui Faktor apa yang menyebabkan bisnis penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya sulit untuk dihilangkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Teori yang digunakan yakni 1) eksploitasi 2) elit dan 3) rent seeker. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer yakni pemerintah desa, pengusaha tambang dan masyarakat di sekitar pertambangan dan sumber data sekunder yakni literatur buku, jurnal, dokumen tertulis, skripsi, atau tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1).Dampak eksploitasi penambangan pasir golongan c di Desa Julukanaya yakni a. Meningkatnya polusi udara, b. Peningkatan kebisingan, c. Rusaknya jalan. 2). Faktor Penyebab Penambangan Pasir Golongan C Masih Tetap Berlangsung yaitu a. Adanya politik klan dan basis-basis keluarga pada proses penambangan pasir golongan c, b. Penambangan pasir sebagai praktek pemburuan rente, c. Upaya pemerintah.

Adapun implikasi penelitian ini ialah1).Diharapkan kepada aparat Pemerintah khususnya dalam ha lini Pemerintah Desa Julukanaya untuk selalu memberikan penyuluhan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Julukanaya terkhusus kepada para penambang yang tidak lain mempunyai hubungan keluarga dengan pemerintah desa. 2). Diharapkan kepada masyarakat Desa Julukanaya untuk dapat memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi eksploitasi yang dapat membawa kerugian bagi masyarakat. 3).Diharapkan kepada pihak kepolisian agar lebih tegas dalam menjalankan tugas agar tidak ada lagi penambangan ilegal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hampir disetiap daerah atau Kabupaten/Kota terdapat kekayaan sumber daya alam. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Semua kekayaan yang ada tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Semua itu sudah terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh Negara memaknai Hak Pengusahaan Negara atas asset kekayaan alam. Digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna itu merupakan kesatuan. Hak penguasaan Negara merupakan instrument sedangkan “sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir pengelolaan sumber daya alam.¹

Seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan manusia terhadap kegiatan sehari-hari seperti kebutuhan

¹Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, (Volume 9, Nomor 1, Maret 2012), H.55

sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Banyaknya peningkatan kebutuhan manusia tersebut maka mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup.

Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan.² Kegiatan penambangan banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Gowa.

Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Bahan galian strategis; (2) Bahan galian vital; dan (3) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.³ Pemanfaatan potensi alam di setiap daerah dapat dilakukan untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari Desa Julukanaya

²Dwi Hari Saputro, "Penambangan Pasir Liar Di Sungai Luk Ulo Dan Implikasinya Terhadap Integrasi Masyarakat", *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2013), H. 2

³Herman K, Muhlis Madani, Muchlas M. Tahir, Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. V No. 2 Oktober 2015), H.138

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Di Desa ini bahan galian C tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Bagi yang berhubungan langsung dengan lokasi, seperti desa. Karena di lokasi galian C di daerah ini berada sangat dekat dengan permukiman masyarakat (desa), maka biasanya pihak pengelola memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sekitar untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja kasar “pengumpul pasir” di tambang galian C tersebut.⁴

Dengan mengoptimalkan sumber daya alam, baik yang ada di darat atau pun di laut, hal itu akan memungkinkan peningkatan ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi. Sebab, di mata dunia memang sudah memandang bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi. Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan.

⁴Herman K, Muhlis Madani, Muchlas M. Tahir, “Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. V No. 2 Oktober 2015), H.138

Pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap pasir yang berlebihan juga harus di sosialisasikan. Karenajika masyarakat tidak diberikan arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari tambang pasir maka kegiatan pertambangan akan semakin berkembang marak dan tidak terkendali.

Dalam pandangan ekonomi, sumber daya alam yang melimpah ini menjadi potensial untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengelolanya. Namun tetap dalam hal ini peran politik itu juga terlibat. Dimana ada irisan antara kegiatan ekonomi dan politik dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Politik yang bisa diartikan sebagai upaya – upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, berperan dan berwenang untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan diperuntukan sepenuhnya bagi rakyat.

Namun kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini terkadang bisa dibilang sebagai “kutukan” bagi suatu Negara. Kenapa bisa dibilang sebagai “kutukan”? mungkin kita terheran – heran dengan pernyataan tersebut. Namun ada asumsi dasar mengapa sumber daya alam yang melimpah bisa dikatakan sebuah kutukan. Eksploitasi merupakan kata untuk menjawab pernyataan tersebut, eksploitasi yang berlebihan akan memberikan dampak negatif yang lebih banyak dibanding positifnya dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Negara – negara yang kaya akan sumber daya alam biasanya selalu terjebak dalam perumusan regulasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Kebijakan yang tidak berkualitas itu bersumber dari realitas bahwa kekayaan dengan mudah diperoleh dengan jalan menguras SDA. Akhirnya, kebijakan ekonomi yang diproduksi fokus

pada eksploitasi dan rente ekonomi SDA untuk dijual, baik dalam pasar domestik maupun internasional, tanpa menghitung kelayakan daya dukung lingkungan.⁵

Adapun ayat yang berkaitan tentang kerusakan lingkungan sebagai berikut :

QS.Ar-Rum/30: 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).⁶

Demikian yang terjadi Kabupaten Gowa mengenai eksploitasi penambangan pasir di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga. Ada indikasi ada kebijakan pemerintah yang buruk mengenai aturan pengelolaan SDA khususnya penambangan pasir. Dengan realita banyak dampak negatif dan keluhan masyarakat dari proses penambangan besi di wilayah tersebut. Mengingat kegiatan pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius seperti rusaknya jalan, berkurangnya lahan untuk bertani, dan sangat berbahaya bagi pemukiman masyarakat dalam suatu

⁵Ahmad Erani, Yustika. 2009, *Ekonomi Politik (Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris)* (Cetakan I. Yogyakarta. Pustaka Pelajar), H. 135

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), H. 408-409

kawasan atau wilayah. Maka dari itu, menarik untuk menganalisis eksploitasi penambangan pasir di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dari segi ekonomi politik.

Kepedulian tentang lingkungan juga dapat dilihat dalam islam, hal ini dapat dilihat dalam salah satu Hadis Rosulullah s.a.w sebagai berikut :

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَتْ لِرَجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضَيْنِ، فَقَالُوا نُوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْلَيْمَنْحَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya:

Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rosulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu.⁷

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang punya tanah maka hendaklah memperhatikan dan memeliharanya. Akan tetapi kebanyakan orang mempergunakan tanahnya untuk dijadikan sebagai mata pencaharian meskipun menimbulkan akibat yang besar, salah satunya seperti tambang golongan C.

Dalam bisnis penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya, ada kecenderungan bahwa dalam proses pengelolaannya itu berbasis keluarga atau sering juga di dengar adanya politik klan. Istilah “politik klan” mengacu pada praktek politik

⁷DR.H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), H. 263-264.

yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan atau kepentingan. Penggunaan istilah “klan” juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah “oligarki politik”. Sejarah oligarki merupakan sejarah yang identik dengan dua hal, pertama oligarki yang menandakan superioritas orang berpunya, kedua oligarki identik dengan bagaimana sepak terjang di dunia politik dalam posisinya sebagai elit.⁸

Pada bisnis penambangan pasir di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Kepala Desa maupun Camat Pallangga cenderung melakukan pembiaran terhadap kegiatan penambangan liar di Kecamatan Pallangga. Ada kesan bahwa Kepala Desa maupun Camat Pallangga tidak mampu berbuat maksimal untuk memperlakukan penambang tersebut sebagai penambang liar secara hukum. Selain itu antara Kepala Desa dan Camat Pallangga dianggap kurang melakukan komunikasi dalam melakukan pengawasan. Kepala Desa menganggap bahwa dia sudah menyampaikan ke Camat Pallangga sementara Camat Pallangga menganggap itu adalah tanggung jawab teknis Kepala Desa karena berada di wilayahnya masing-masing.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis memilih judul penemelitian sebagai berikut: *“Analisis Ekonomi Politik Terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga*

⁸Habiba, “Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Politik Klan H. Andi Masdar Pasmal).” *Skripsi* (Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politikuin Alauddin Makassar, 2016), H.1-2

⁹Herman K, Muhlis Madani, Muchlas M. Tahir, “Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. V No. 2 Oktober 2015), H.144

Kabupaten Gowa”. Dimana pada penelitian yang penulis ingin teliti adalah analisis ekonomi politik terhadap eksploitasi penambangan pasir golongan C di daerah Gowa yang sangat erat kaitannya dengan politik klan atau keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak eksploitasi yang dilakukan dalam proses penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya?
2. Faktor apa yang menyebabkan bisnis penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya sulit untuk dihilangkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan penelitian
 - a. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, Mengetahui Bagaimana dampak eksploitasi yang dilakukan dalam proses penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya.
 - b. Mengetahui Faktor apa yang menyebabkan bisnis penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya sulit untuk dihilangkan.
- 2) Manfaat penelitian
 - a. Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu, Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan tentang Bagaimana dampak eksploitasi yang dilakukan dalam proses penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya.

- b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan penjelasan tentang Faktor apa yang menyebabkan bisnis penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya sulit untuk dihilangkan.

D. Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Masalah	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	M.Nur	Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasungu Kabupaten Maros	Penelitian ini mencoba mengurai dan mendiskripsikan fenomena apa saja yang terjadi dalam hal resistensi penambangan ilegal: studi kasus eksploitasi tambang galian C (pasir), aspek apa saja yang menyebabkan penambang pasir ilegal bertahan, dan bagaimana pemerintah menyikapi	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian.	resistensi penambangan ilegal terdapat beberapa faktor, diantaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat penambang, lapangan kerja, hubungan saling menguntungkan, peraturan Daerah, teguran lisan, dan sosialisasi. Keberadaan penambangan memberikan dampak fisik dan dampak sosial

			aktivitas penambangan ilegal sehingga masih bisa tetap bertahan.		ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak meluas. ¹⁰
2.	Kiki rizki desianti	Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial – Ekonomi Masyarakat Didesa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang	pertambangan pasir di Desa Pancanegara berdampak pada lingkungan sosial – ekonomi diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, namun keuntungan tersebut jauh dibandingkan dengan kerugian	Metodelogi yang digunakan yaitu metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Instrumen utama penelitian adalah meneliti sendiri. Teknik	Hasil menunjukkan pertambangan pasir di desa pancanegara berdampak pada lingkungan sosial – ekonomi diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal , namun keuntungan tersebut jauh

¹⁰M.Nur, “Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,Universitas Hasanuddin, 2014), H. 7

			berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara dan kerusakan alam yang dialami oleh daerah	pengumpulan data yang digunakan wawancara , observasi dan studi dekomendasi	dibandingkan dengan kerugian berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara dan kerusakan alam yang dialami oleh daerah. Terbukti dari adanya rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek lingkungan, pemerintah harus berupaya membuat kebijakan yang mengatur masalah eksploitasi pasir, pihak perusahaan
--	--	--	---	---	--

					<p>harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan proses pengelolaan pertambangan pasir harus lebih ditingkatkan dampak – dampak negatif yang timbul dikemudian hari dapat diminimalisir.¹¹</p>
3.	Ayatulasmaulhusna	Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan	persepsi/pandangan masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan pasir di	penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak

¹¹Kiki Rizki Desianti, “Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial – Ekonomi Masyarakat Didesa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang”, *Skripsi*, (Serang: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012), H. 2

		Pattallassang Kabupaten Takalar	Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dan mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.	dengan pendekatan kualitatif.	Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C bahwa setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan “C” baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan, Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Pertambangan Rakyat, dan
--	--	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---

					Perusahaan dengan modal bersama. ¹²
4.	Rizky arie kurniawan	Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung	Isu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, seperti halnya yang terjadi pada Bukit Camang.	penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data Isu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling	Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Pada kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki

¹²Ayatul Asmaul Husna, "Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattalassang Kabutapen Takalar", *Skripsi*, (Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), H.70

				berlawanan,	izin namun terus beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh <i>rent seeking</i> , yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan
--	--	--	--	-------------	--

					secara pribadi juga. ¹³
5.	Marini, sumban gan baja, iqbal sultan	Penerimaan Informasi Dampak Penambanga n Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa	Penambangan pasir dengan mesin pompa isap di Kabupaten Gowa pada umumnya terjadi di daratan yang dulunya merupakan aliran sungai purba. Daratan yang banyak dikeruk permukaannya untuk dijadikan tanah timbunan atau bahan pembuatan batu bata. Pengerukan di daratan ini menyisakan rongga yang berair dalam sehingga tidak	Metodelogi yang digunakan yaitu metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.	Pemahaman penambang illegal tentang informasi dampak penambangan pasir terhadap lingkungan mengalami hambatan disebabkan metode penyampaian pesan kurang memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi efektif serta lemahnya argumentasi pihak BLHD dalam mempersuasif

¹³Rizky Arie Kurniawan, "Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung", *Skripsi*, (Bandar Lampung:Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung, 2017), H.4-5

			bisa lagi ditanami.		<p>penambang.</p> <p>Penggunaan tipe pesan neutral argument harus ditingkatkan ke strong argument.</p> <p>Beberapa penggabungan pengolahan pesan secara sentral dan perifer nampaknya tetap harus dipertimbangkan oleh pihak komunikator (BLHD), misalnya mempertimbangkan isyarat perifer (pembawa pesan, media) seperti siapa yang dapat diutus untuk memberikan pesan persuasive kepada penambang. Dan</p>
--	--	--	---------------------	--	---

					bagaimana pesan tersebut disampaikan. ¹⁴
--	--	--	--	--	---

Dari 5 tulisan tersebut, semuanya menjelaskan tentang ekonomi politik penambangan pasir pada lokasi yang berbeda dengan proses yang berbeda pula. Sedangkan pada penelitian yang penulis ingin teliti adalah analisis ekonomi politik terhadap eksploitasi penambangan pasir golongan C di daerah Gowa yang sangat erat kaitannya dengan politik klan atau keluarga.



¹⁴Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan, Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa, *Jurnal Komunikasi Kareba*, (Vol. 3, No. 2 April – Juni 2014), H.115-117

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori

1. Eksploitasi

Eksploitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan sesuatu untuk keuntungan sendiri. Kegiatan Eksploitasi ini dapat menciptakan kerusakan. Penambangan dalam skala besar dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sering disampingkan dengan kegiatan pertambangan.

Eksploitasi adalah usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Kegiatan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat bahan galiannya yaitu, galian padat dan bahan galian cair serta gas. Eksploitasi merupakan pengambilan sumberdaya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Eksploitasi merupakan salah satu dampak dari industrialisasi yang terjadi. Hal ini merupakan suatu proses perubahan sosialekonomi yang merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dimana

perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Adapun Ayat yang menjelaskan tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi yang terdapat pada surah Al A'raf/07: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*¹⁵

Eksplorasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya alam sebagai pedapatan dibandingkan dengan modal. Perkembangan teknologi merupakan bagian dari modernisasi. Dikatakan berkembang apabila pralatan yang digunakan telah terjadi perubahan dari tradisional ke modern yang pada akhirnya menyebabkan perubahan hubungan sosial masyarakat.

Eksplorasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, yaitu :

1. Dampak Positif

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Kegiatan penambangan pasir ini memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), H. 157

mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir ini memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatanya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Namun pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan pasir yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

c. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat

Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya meningkatkan daya kreativitas masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan pasir hasil galian untuk di buat kerajinan tangan, bahan bangunan, dan lain-lain.

2. Dampak Negatif

a. Meningkatnya polusi udara

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika dilokasi tambang

tersebut jika berlangsung pada musim kemarau. Kuantitas dampak relatif kecil, hanya disekitar lokasi penggalian dan jalur transportasi yang dilalui dan berlangsung hanya untuk sementara waktu selama operasi.

b. Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk yang melintas, dan suara mesin pemompa pasir yang menunjang aktivitas pengerukan atau penambang.

c. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air diakibatkan dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan jalan. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi.

d. Rusaknya jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya alat atau mesin-mesin berat seperti mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkutan tersebut melebihi kapasitas yang ditentukan. Selain itu juga pengangkutan bobot beban yang berlebihan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama di jalur utama.

e. Pengerukan atau penambangan

Akibat pengerukan atau penambangan adalah terbentuknya cekungan-cekungan bekas penambang. Dengan cara menerapkan tata cara penambangan yang baik dan benar serta mempertimbangkan aspek lingkungan tidak akan menimbulkan dampak negatif.

Hal ini sangat sesuai, mengingat kegiatan pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Potensi tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengelolaan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain.¹⁶

Adapun ayat yang melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi yang di jelaskan pada surah Al Qashash/28 : 83

تِلْكَ آيَاتُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ٨٣

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

¹⁶M.Nur, "Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros", *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,Universitas Hasanuddin, Makassar , 2014), H. 24-28

*berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹⁷

2. Teori Elit

Istilah elit secara etimologis berasal dari kata eligere, yang berarti memilih. Kata “elite” menunjuk pilihan, pilihan bangsa, budaya, kelompok usia, dan orang-orang yang mendudui posisi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, elite adalah sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting.

Secara konseptual, para ahli belum menemukankesepkatan tentang definisi elit politik yang baku. Para ahli memberikan definisi sesuai dengan keahlian dan sudut pandang masing-masing. Dari beragamnya pendapat hli tentang elite, Suzana Kellermenelompokkan dua aliran. Pertama, kelompok ahli yang beranggapan bahwa golongan elite adalah golongan elite tunggal, yag biasa disebut elit politik. Ahli yang di golongankan dalam kategori ini adalah Aristoteles, Gaetano Mosca, dan Pareto. Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. Para ahli yang termasuk kategori ini adalah Saint Simon, Karl Manhein, dan Raymond Aron.¹⁸

Persoalan akhlak dalam kehidupan politik bangsa ini telah menjadi barang langka. Di mana-mana dengan mudah ditemukan praktek-praktek yang tidak

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), H. 395

¹⁸Muslim Mufti, M, Si, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) H. 69-70

bermoral, kejahatan, dan kebiadaban yang dilakukan oleh anak bangsa yang notabene beragama merebak di berbagai waktu dan tempat. Agama telah menjadi bagian temporal dari kehidupan umat manusia, agama tidak lagi menjadi panduan dalam kehidupan anak bangsa, agama hanya berkaitan dengan ritual semata, agama dipisahkan dengan akhlak berorganisasi, berpolitik dan bermasyarakat.

Pemisahan antara agama dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, keluarga, kekuasaan dan kemasyarakatan justru dilakukan dalam prakteknya oleh kaum yang menganjurkan penyatuan agama dengan politik, ekonomi, dan kemanusiaan lainnya.

Banyak kalangan menyebutkan, bahwa bangsa kita (Indonesia) tengah mengalami krisis kepemimpinan atau setidaknya sulit mencari seorang sosok pemimpin yang ideal, pemimpin yang paripurna yakni pemimpin yang dapat diteladani oleh umat dan bangsa. Seorang pemimpin yang ideal dan paripurna, haruslah melekat dalam dirinya sejumlah kelebihan bila dibandingkan dengan calon pemimpin yang lainnya, misalnya memiliki integritas moral (akhlak), memperoleh legitimasi politik, cakap, powerful, dan memiliki daya resistensi yang relatif kecil artinya figure tersebut setidaknya dapat diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia yang heterogen dan majemuk atau dengan istilah masyarakat yang multi-kulturalisme.

Elit yang berkusa merupakan hasil dari kontestasi politik demokratik, meskipun dihasilkan dari pemilu yang demokratis, pemerintah berkuasa dalam pandangan sejumlah kalangan kritis belumlah mencerminkan semangat moralitas, ini juga terkait dengan penyelenggara pemilu yang dipandang bermasalah.

Terbongkarnya mafia pemilu 2009 bisa menjadi alat justifikasi untuk mengatakan bahwa pemerintah berkuasa dihasilkan dari pemilu yang penuh dengan kecurangan dan manipulasi. Langkah yang bisa dilakukan oleh mereka yang berkuasa adalah menunjukkan langkah-langkah konkret untuk menjawab tuntutan dan harapan yang berkembang di kalangan masyarakat luas, seperti penegakan hukum yang adil bagi para koruptor. Keterpurukan dalam banyak bidang dan kesulitan hidup yang kini dirasakan oleh warga negara akibat pengelolaan negara yang tidak mencerminkan semangat kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Banyak elit politik yang secara ekonomi sebelum menduduki posisi politiknya tidak begitu mewah, tapi setelah berkuasa menjadi secara “mendadak” menjadi mewah, kemewahan yang secara tiba-tiba itu diperoleh dari hasil apa? Sebagian kalangan menyebut bahwa mereka yang baru berkuasa, tetapi hartanya melimpah ruah, tentu di curigai ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, golongan dan kroni politiknya mereka yang berkuasa seperti bagi-bagi proyek.

Kekuasaan nampaknya merubah watak dan kepribadian manusia, kalau tadinya banyak manusia yang secara lahir kelihatannya pejuang moral sejati, pembela kebenaran, penyokong demokratis, anti korupsi dan pamrih hidunya untuk memperbaiki masyarakat, bangsa, negara dan dunia kemanusiaan secara universal, tapi ketika ia menduduki suatu jabatan atau berkuasa, maka label dan atribut moral tadi seketika hilang begitu saja, ia menjadi manusia yang anti demokratis, menginjak-injak moral, korup, dan pamrihnya hanya untuk kekuasaan dan kekayaan.

3. Teori Rent seeker

Didik J Rachbini mengemukakan bahwa dalam kajian ekonomi politik rent seeking merupakan perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Menurutnya, perburuan rente (rent seeking) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (rent seekers). Praktek berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan Parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor produk barang yang merupakan bagian dari praktik perburuan rente ekonomi.¹⁹

Dalam teori ekonomi politik *rent seeking*, penambangan pasir disini merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pemerintah untuk

¹⁹ Ratnia Solihah, "Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking", *Jurnal Wacana Politik -Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016), h. 42

memperoleh keuntungan dari penambangan pasir ini. Pasir yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi kepentingannya mendapatkan suatu keuntungan.

Pengusaha tambang melakukan proses penambangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari laba yang dihasilkan, sementara pemerintah sebagai pihak yang berwenang disini bermain dalam proses perizinan proyek penambangan pasir besi di daerah tersebut, dengan alasan bahwa investasi penambangan pasir besi ini akan menambah PAD bagi kas pemerintah.

Pengertian *rent seeking* dalam teori pilihan publik adalah bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan modal kekuasaan. Teori pilihan publik juga dapat mentransformasikan lebih jauh konsep dasar ilmu ekonomi kedalam bidang politik. Dalam konsep dasar teori klasik, Adam Smith membedakan tiga bentuk pendapatan, yaitu keuntungan (*profit*), upah (*wages*) dan sewa (*rents*).

Berdasarkan konsep ekonomi, laba diperoleh dengan pola investasi modal, keahlian dan berbagai investasi sumber daya yang mengandung resiko kerugian. Sementara upah merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh karena seseorang bekerja berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Sedangkan sewa atau rente merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh dari sewa atas modal (uang, mesin, rumah, dan lain-lain) yang merupakan hak milik sendiri. Sedangkan dalam konsep politik, pelibatan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dilakukan dengan asumsi bahwa sektor swasta lebih efisien dibanding

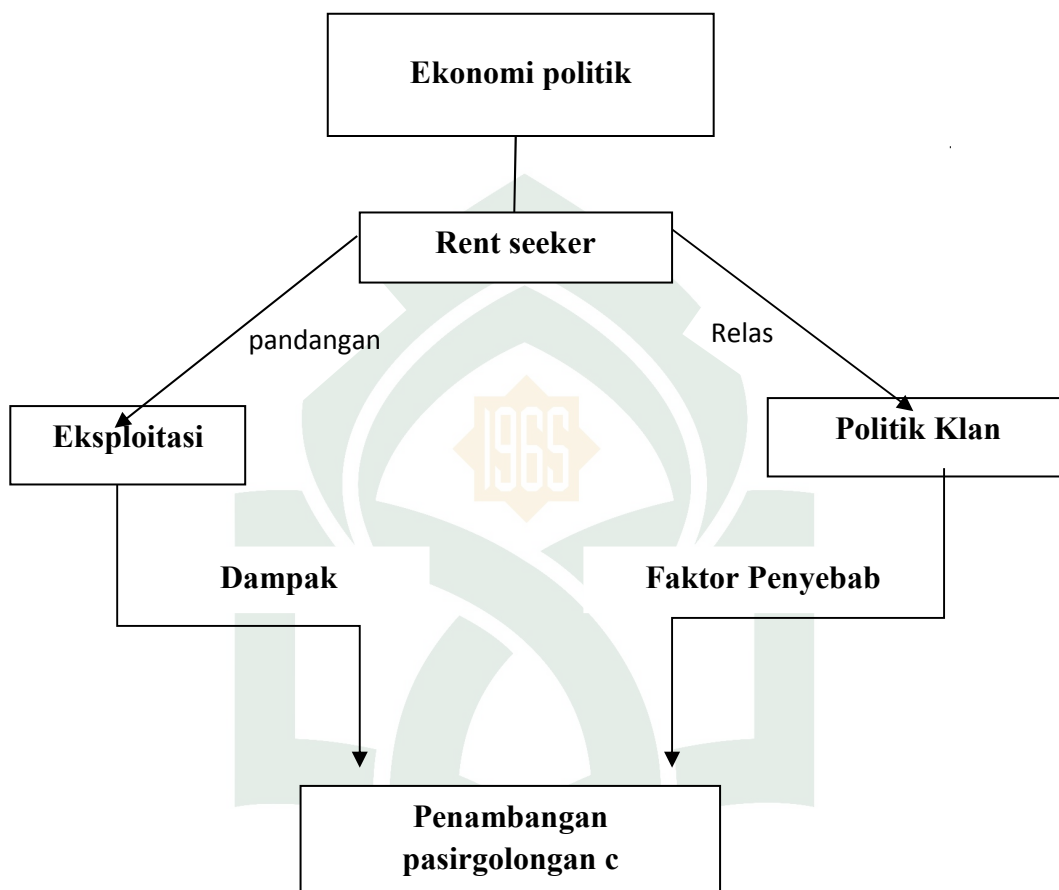
pemerintah. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 membuktikan betapa swasta Indonesia ternyata lebih rapuh dibanding pemerintah

Berbagai praktek konspirasi antara pengusaha dan penguasa tumbuh subur terutama pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru. Banyak kebijakan ekonomi dikeluarkan rezim Soeharto dengan menggunakan justifikasi " demi kepentingan nasional", padahal kebijakan tersebut sejatinya hanya demi menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya distorsi dan inefisiensi dalam kehidupan ekonomi. Gejala konspirasi di antara pengusaha dan penguasa, dalam kajian ekonomi politik, disebut dengan istilah perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*).²⁰



²⁰Rizky Arie Kurniawan, "Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung." *Skripsi* (Bandar Lampung:Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,Universitas Lampung,2017), h.30-31

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian maka metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.²¹

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena social dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

B. Subjek/Objek Penelitian

Untuk mengumpulkan data, telah di tentukan para informan yang akan memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informan merupakan pemerintah desa dan penduduk asli Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

²¹Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008) H.166

Informan yang akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah/kepala Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
2. Tokoh masyarakat
3. Penambang pasir
4. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang.

C. Fokus penelitian dan Deskripsi fokus

1. Fokus penelitian

Penelitian ini berjudul Analisis Ekonomi Politik Terhadap Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada ruang lingkup tambang yang ada di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dari segi ekonomi politik.

2. Deskripsi fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka deskripsi fokus pada penelitian ini yakni dampak eksploitasi penambangan pasir di Desa Julukanaya, dan faktor apa yang menyebabkan sehingga proses penambangan pasir golongan c di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa susah di hilangkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Penelitian harus

mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalanya secara sendiri, atau melalui pengamatan terhadap orang lain yang sudah dilatih peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut.²²

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas dari kenyataan yang ada, tentang keadaan dan kondisi objek yang diteliti. Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak di peroleh melalui wawancara.

Pada penelitian yang akan dilakukan di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, observasi dilakukan secara langsung di lokasi proses penambangan pasir.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana jawaban informan akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.²³

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan, pendapat masyarakat terhadap Resistensi penambang studi kasus Eksploitasi tambang galian C (pasir) di Desa Julukanaya Kabupaten Gowa.

²²Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), H.37-38

²³Lisa Harrison, *Metode Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2009), H.104

Untuk itu maka model wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara mendalam.

a. Wawancara terstruktur

Model wawancara terstruktur dimaksudkan disini adalah dimana peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berbentuk pedoman wawancara, walaupun tidak harus diikuti secara sistematis, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam wawancara yang dapat berkembang dilapangan. Untuk wawancara terstruktur dilakukan pada Pemerintah setempat, pemilik pertambangan pasir, masyarakat, buruh, dan tokoh masyarakat.

b. Wawancara tidak terstruktur

Model wawancara tidak terstruktur, pertanyaan tidak disusun secara sistematis, akan tetapi pertanyaan bersifat situasional. Dalam prakteknya kedua model wawancara tersebut pada umumnya tidak dibatasi semata pada gejala yang akan diamati. Oleh karena itu, wawancara tidak terstruktur ditujukan pada remaja.

c. Wawancara mendalam

Dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian Wawancara adalah merupakan

pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel (responden).

Teknik ini biasanya melekat erat dengan penelitian kualitatif. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Perss, 1999), h. 72.

sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Setelah data terkumpul, kemudian melakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah proses editing dilakukan proses coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis.²⁵ Dalam teknik analisis data, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar”

²⁵Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008) H.56-57

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.²⁶ Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.²⁷ Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

3. Teknik Analisis Perbandingan (*Komparatif*)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁸

²⁶Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Cet.VI; Bandung : Alfabeta, 2008), h. 247

²⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 249

²⁸Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Gowa

a) Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada $12^{\circ}38.16'$ Bujur Timur dari Jakarta dan $5^{\circ}33.6'$ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara $12^{\circ}33.19'$ hingga $13^{\circ}15.17'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}5'$ hingga $5^{\circ}34.7'$ Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah

tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

b) Visi dan Misi DPRD Kabupaten Gowa

1. Visi

Terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Misi

a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.

b) Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.

c) Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.

d) Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan.

- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan.

2. Desa Julukanaya kecamatan pallangga kabupaten gowa

a. Sejarah Desa

Desa Julukanaya terbentuk pada tahun 1991, yang merupakan Desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Julubori yang pada saat itu dipimpin oleh Hamsah Talli, kemudian dimekarkanlah desa Julubori tersebut menjadi Tiga Desa yaitu Desa Julubori, Desa Julukanaya, dan Desa Julupa'mai.

Urutan Kepemimpinan Desa Julukanaya setelah dimekarkan dari desa Julubori:

- 1) Baso Ahmad Dg Nai yang menjabat sampai 5 tahun, sebagai Pelaksana Tugas.
- 2) Kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa tahun 1994 yang dimenangkan oleh H. Abd. Rasyak rani dan menjabat selama 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1994-2004.
- 3) Muh. Ilyas Dg Gau yang menjabat dari tahun 2004-2009.
- 4) Aliminur Nassayang menjabat dari tahun 2009-2014, Kemudian Aliminur Nassa mengundurkan diri pada Bulan Agustus Tahun 2014.
- 5) Dra, Kamsinah, MM (Kepala Wilayah Kecamatan Pallangga) yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa Julukanaya untuk sementara, dan kemudian Abd. Rahman Buang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Wilayah Kecamatan Pallangga sekaligus Plt Kepala Desa Jululkanaya untuk menjabat Sebagai pelaksana harian Kepala Desa Julukanaya.

b. Sumber Daya Alam

Desa Julukanaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas 3080 Ha. Secara geografis Desa Julukanaya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Julubori Kecamatan Pallangga, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Pa'nakukang Kecamatan Pallangga

Secara Administratif, wilayah Desa Julukanaya terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Pancana, Dusun Tabbanga, Dusun Biring Balang, dan Dusun Cambaya. 11 (sebelas) Rukun Warga, dan 22 (dua puluh dua) Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Julukanaya terdiri dari persawahan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Julukanaya secara umum termasuk daerah dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Julukanaya diklasifikasikan kepada <25 meter di atas permukaan laut.

Penggunaan lahan Desa Julukanaya dapat dilihat pada tabel 01 sebagai berikut :

Tabel I
Penggunaan Lahan Persawahan

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m
2.	Irigasi Setengah Teknis	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	1700 m	1700 m	1700 m	1700 m	1700 m
4.	Irigasi Non PU	750 m	750 m	750 m	750 m	750 m
5.	Tadah Hujan	700 m	700 m	700 m	700 m	700 m
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan	40	45	50	55	60 Ha
2.	Tegal/Kebun					
3.	Ladang/Huma					
4.	Pengembalaan/Padang Rumput					
5.	Sementara Tidak Diusahakan	35	30	25	20	20 Ha
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	1500 m2	1500 m2	1500 m2	1500 m2	1500 m2
7.	Hutan Negara					
8.	Perkebunana					
9.	Rawa-rawa					1000 m2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
10.	Tambak	-	-	25	30	50 Ha
11.	Kolam/Empang					3 bh
12.	Lahan Lainnya					

Sumber data: RKP Desa Julukanaya²⁹

Sesuai dengan data diatas maka kita bisa lihat bagaimana banyaknya lahan yang bisa digunakan untuk usaha, akan tetapi karena dengan adanya tambang di Desa Julukanaya maka lahan ini semakin tahun semakin berkurang, sehingga warga akan susah nanti mencari lahan terutama bagi para petani di Desa Julukanaya.

Tabel II
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi					130	132
	Jagung						2
	Ubi Kayu						½
	Ubi Jalar						
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					-
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya						
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					-
	Kelapa						

²⁹Sumber data: RKP Desa Julukanaya, Tahun 2016

	Karet						
	Kopi						
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		70	85	90	110	140
	Kerbau		-	-	-	-	-
	Kambing		-	-	-	12	23
	Ayam		30.000	40.000	50.000	60.000	80.000
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang						1
	Keramba						-
	Tambak						-

Sumber data: RKP desa Julukanaya³⁰

Dari kondisi alam Desa Julukanaya diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Julukanaya dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Julukanaya Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga dapat dilihat pada tabel 03 sebagai berikut :

Tabel III
Sumber Daya Alam Desa Julukanaya Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	<i>Pasir Urug</i>	M ³	-	10	15	20	25
2.	<i>Lahan Tegalan</i>	Ha	65	60	55	50	45
3.	<i>Lahan Hutan</i>	Ha					
	JUMLAH		65	70	65	70	65

Sumber data: RKP desa Julukanaya.³¹

³⁰*Sumber data:* RKP Desa Julukanaya, Tahun 2016

³¹*Sumber data:* RKP Desa Julukanaya, Tahun 2016

Sesuai data yang ada diatas Desa Julukanaya merupakan desa yang memiliki banyak potensi dalam bidang pertanian akan tetapi setelah adanya tambang, maka penghasilan petani pun semakin berkurang ini disebabkan karena lahan untuk bertani pun semakin berkurang.

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Julukanaya berdasarkan Profil Desa tahun 2015 sebanyak 4958 jiwa yang terdiri dari 2.493 laki laki dan 2.465 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Pertanian.

Data Sumber Daya Manusia Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga dapat dilihat pada tabel 04 sebagai berikut :

Tabel IV

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2011 s.d. 2015

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	2365	2392	2428	2460	2493
	b. Penduduk Perempuan	Orang	2360	2382	2405	2440	2465
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	965	997	1109	1200	1301
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang					
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	2	3	5	7	10
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang					
	d. Perdagangan	Orang	49	53	60	66	76

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Besar/Eceran dan Rumah Makan						
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang					
	f. Jasa	Orang					
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang	23	43	54	67	89
	b. TNI/Polri	Orang	7	10	13	15	17
	c. Swasta	Orang	76	85	101	119	130
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	181	196	201	221	233
	e. Petani	Orang	751	780	796	803	822
	f. Tukang	Orang	163	181	193	210	230
	g. Buruh Tani	Orang	159	171	186	201	226
	h. PNS/Pensiunan	Orang	26	28	31	33	36
	i. Nelayan	Orang			15	27	31
	j. Peternak	Orang	2	2	3	4	5
	k. Jasa	Orang	3	5	7	8	10
	l. Pengrajin	Orang	3	4	6	8	9
	m. Tidak bekerja/penganggur	Orang	3043	3062	3084	3102	3126
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	72	81	90	96	102
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	726	785	803	820	852
	3) SMP/ Sederajat	Orang	480	500	520	536	576
	4) SMA/ Sederajat	Orang	446	572	580	602	616
	5) Akademi/D1-D3	Orang	21	26	34	41	46
	6) Sarjana	Orang					
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang	61	66	70	74	80

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	b) S2	Orang					
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang	3	5	7	9	10
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang					
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang					
	4) Kursus Keterampilan	Orang	9	12	15	17	20
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	471	483	502	518	531
	2) Tidak bersekolah	Orang					683
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS	Orang					286

Sumber data: RKP desa Julukanaya.³²

B. Gambaran Singkat Tentang Penambangan Pasir Di Kabupaten Gowa

Pemanfaatan potensi alam di setiap daerah dapat dilakukan untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Di Desa ini bahan galian C tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Bagi yang berhubungan langsung dengan lokasi, seperti desa.

³²*Sumber data: RKP Desa Julukanaya, Tahun 2016*

Karena di lokasi galian C di daerah ini berada sangat dekat dengan permukiman masyarakat (desa), maka biasanya pihak pengelola memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sekitar untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja kasar “pengumpul pasir” di tambang galian C tersebut.

Permasalahan yang paling pertama muncul dari pengelolaan galian C di daerah ini adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut galian C tersebut dari lokasi tambang menuju ke “konsumen”. Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C di daerah ini masih dilapisi dengan aspal kasar (bukan Hotmik) sehingga tidak mampu untuk menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk berbadan besar (Tonase muatan kendaraan tidak sebanding dengan Tonase kelas jalan) sehingga satu-satunya jalan menuju desa yang menjadi lokasi galian C tersebut rusak parah. Permasalahan kedua yaitu ketersediaan bahan galian C merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka permasalahan baru muncul.

Habisnya bahan galian C berupa tanah liat menyebabkan pihak pengelola tambang mulai melakukan ekspansi atau perluasan ke lahan-lahan yang ada disekitarnya yang memiliki potensi bahan galian di bawahnya. Hal ini sudah mulai terjadi, dimana masyarakat yang memiliki lahan disekitar lokasi tambang baik itu lahan pertanian pangan maupun perkebunan yang dibawahnya memiliki potensi bahan tambang maka pengelola tambang dengan berbagai trik rayuan berusaha untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan yang mayoritas adalah masyarakat kecil

yang tidak berpendidikan agar mau “menjual” lahan mereka kepada pihak swasta atau pengelola tambang tersebut.

Kegiatan pertambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga dikategorikan tidak memiliki izin. Hal ini diperkuat oleh pengakuan seorang informan yang bekerja sebagai buruh tambang di salah satu tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga yang menyatakan bahwa:

“setahu saya, saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih tiga tahun saya menganggap kalau tambang ini tidak berizin, karena terus terang, ketika ada tiba-tiba pemeriksaan dari Polisi Pamong Praja saya sering berlari dan sembunyi, nanti kalau pak Pamong Praja sudah pergi baru saya kembali bekerja” kita terpaksa lari karena disuruh sama yang punya tambang”³³

Penambangan di desa Julukanaya sebenarnya sudah lama berlangsung akan tetapi izin tambang disana belum diketahui dan masih bersifat illegal, dan ketika penggerebekan akan berlangsung, para pelaku tambang pasti mendapatkan informasi dari orang yang mengetahui kalau akan ada penggerebekan dan mereka pun akhirnya bisa lolos dari penngerebekan tersebut.

C. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya

Eksploitasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya alam sebagai pedapatan dibandingkan dengan modal. Perkembangan teknologi merupakan bagian dari modernisasi. Dikatakan berkembang apabila pralatan yang digunakan telah terjadi perubahan dari tradisional ke modern yang pada akhirnya menyebabkan perubahan hubungan sosial masyarakat.

³³Dg Situ, Pekerja Tambang, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 5 November 2017 Pukul 15.00 Wita

Dalam wawancara dengan kepala desa Julukanaya, Ilyas Dg Gau juga mengatakan bahwa:

“Eksplorasi itu harus di berhentikan karena semakin hari daratan di desa Julukanaya semakin berkurang sedangkan masyarakat semakin bertambah. dan sekarang lahan atau daratan itu sudah berkurang 15%.”³⁴

Adapun dampak yang di timbulkan dari penambangan pasir antara lain:

1. Meningkatnya polusi udara

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika dilokasi tambang tersebut jika berlangsung pada musim kemarau. Kuantitas dampak relatif kecil, hanya disekitar lokasi penggalian dan jalur transportasi yang dilalui dan berlangsung hanya untuk sementara waktu selama operasi.

Salah seorang warga desa Julukanaya juga menegaskan dalam wawancara dengan mengatakan:

“setiap musim kemarau itu udara selalu tidak segar karena udaranya bercampur dengan debu-debu yang disebabkan oleh truk pengangkut pasir, bahkan debu-debu pun selalu masuk kedalam rumah.”³⁵

³⁴Ilyas Dg Gau, Kepala Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 21 Juli 2017 Pukul 11.00 Wita

³⁵Yuliana Dg Mine, Masyarakat Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 5 November 2017 Pukul 11.00 Wita

2. Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk yang melintas, dan suara mesin pemompa pasir yang menunjang aktivitas pengerukan atau penambang.

Dalam wawancara saya dengan dg situ juga mengatakan bahwa:

“Kami itu mulai bekerja biasanya pada jam 3 dini hari, dan pada saat itu pompa pasir juga sudah dinyalakan dan itu memang mengganggu masyarakat, dulu saya juga pernah di datangi langsung oleh warga dan mereka marah karena mereka merasa tidurnya terganggu dengan suara mesin pompa yang kami bunyikan”³⁶

3. Rusaknya jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya alat atau mesin-mesin berat seperti mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkutan tersebut melebihi kapasitas yang ditentukan. Selain itu juga pengangkutan bobot beban yang berlebihan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama di jalur utama.³⁷

Hal ini juga di tegaskan yuliana dg minne dengan mengatakan:

“Memang selama tambang ini berjalan, jalan disini setiap hari semakin rusak parah, terutama pada setiap musim hujan pasti jalan di

³⁶Dg Situ, Pekerja Tambang, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 5 November 2017 Pukul 15.00 Wita

³⁷M.Nur, “Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros”, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,Universitas Hasanuddin, Makassar , 2014), H. 24-28

depan rumah tidak bisa dilewati oleh motor, karena jalannya licin dan berlumpur”³⁸

Dalam proses penambangan pasir di desa Julukanaya dampak eksploitasi yang paling parah yaitu rusanya jalan, karena jalan di desa Julukanaya sudah berapa kali dilakukan akan tetapi jalan yang sudah di perbaiki tidak bertahan lama, dan sampai sekarang pun masih ada jalan yang rusaknya sangat parah karena sudah tidak bisa di lewati oleh masyarakat umum.

D. Faktor Penyebab Penambangan Pasir Golongan C Masih Tetap Berlangsung

1. Adanya politik klan dan basis-basis keluarga pada proses penambangan pasir golongan c

Istilah “politik klan” mengacu pada praktek politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah “klan” juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah “oligarki politik” dalam studi lain. Belum banyak studi yang menjelaskan pengertian politik klan secara spesifik. Pada umumnya, kata “klan” berarti keluarga/kelompok atau suku. Dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, clan berarti anak. Sementara itu, kata “klan” lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai sebuah kelompok sosial yang permanen berdasarkan keturunan langsung atau fiktif (dugaan) dari nenek moyang yang sama.

³⁸Yuliana Dg Mine, Masyarakat Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 5 November 2017 Pukul 11.00 Wita

Terbentuknya politik klan disebuah daerah seharusnya perlu dihilangkan, sebab terbentuknya politik klan merupakan sebuah permasalahan yang berdampak pada sistem politik yang ada, terutama pada bagian akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk satu kelompok kepentingan dan merugikan kelompok lainnya. Akan tetapi, jika klan tersebut sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke politik dan pemerintahan, tak masalah dan memberikan sebuah ruang tertentu dimana orang lain juga masuk. Namun, jika hanya mengandalkan nama besar keluarga dan tak memiliki kompetensi, merupakan kesalahan besar. Akan tetapi, realitanya yang ada saat ini terbentuknya politik klan bukannya dihilangkan melainkan terbentuknya politik klan semakin bertambah disebuah daerah sehingga terkadang tidak ada ruang tertentu dimana orang lain juga masuk.³⁹

Politik klan bergulir melalui budaya tradisional yang kerjanya didasarkan pada keturunan, hubungan sanak keluarga. Dalam kasus tertentu, politik klan bahkan dilangsungkan melalui pertalian darah yang dibuatbuat (fiktif), dan ini merupakan sebuah tantangan yang sangat serius bagi proses pembangunan politik modern. Klan adalah sebuah organisasi sosial tradisional yang “bersaing untuk kekuasaan agar dapat menetapkan peraturan” dan mempengaruhi berbagai tuntutan dan konflik sosial.

³⁹Habiba, “Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Politik Klan H. Andi Masdar Pasmara)”, *Skripsi*, (Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar, 2016), H.1-2

Rice dan Tucker menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan anak termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak, dan fungsi instrumental yaitu fungsi manajemen sumberdaya keluarga untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui prokreasi dan sosialisasi anak dan dukungan serta pengembangan anggota keluarga.⁴⁰

Dalam penambangan pasir di desa Julukanaya juga terdapat hubungan keluarga sebagaimana dalam wawancara yang dikatakan oleh Dg Sijaya sebagai salah seorang pengusaha tambang berkata:

“Kalau dikatakan hubungan keluarga, yah itu sudah pasti ada karena biar bagaimana kepala desa itu adalah keluarga kita, karena kita tinggal di satu desa yang sama dan mungkin semua masyarakat di desa ini, itu semua sekeluarga.dan usaha ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.”⁴¹

Mengingat manusia adalah makhluk sosial, dan keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menyangkut hubungan antar pribadi dan hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya, maka keluarga tidak dapat berdiri sendiri.Keluarga sangat tergantung dengan lingkungan di sekitarnya (baik lingkungan mikro, meso, ekso dan makro) dan keluarga juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (baik lingkungan mikro, meso, ekso dan makro).Beberapa peneliti memberikan contoh-contoh hubungan antara keluarga dan lingkungan atau disebut sebagai ekologi keluarga. Dijelaskan bahwa saat ini sedang terjadi perubahan-

⁴⁰Herien Puspitawati, “Konsep Dan Teori Keluarga”, *Skripsi*, (Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2012), H.3

⁴¹Dg Sijaya, Pengusaha Tambang , *Wawancara*, Julukanaya Tgl 12 Juli 2017 Pukul 13.00 Wita

perubahan global baik dari segi sosial-ekonomi, teknologi dan politik, serta perubahan sistem dunia yang berdampak pada perubahan dalam keluarga dan masyarakat, misalnya keluarga menjadi tidak stabil dan berada dalam masa transisi menuju keseimbangan yang baru.⁴²

Sementara itu, fenomena politik klan berjalan beriringan ketimpangan sosial-ekonomi. Di masyarakat dimana orang-orang memiliki kesempatan yang berbeda untuk terjun dalam dunia politik dan memenangkan sebuah pemilu, klan menjadi sumber daya penting. Dalam situasi ini, beberapa kelompok masyarakat memiliki akses politik lebih luas. Pada akhirnya, kelompok masyarakat mayoritas yang memiliki akses terbatas untuk ikut serta dalam sebuah kontestasi politik, hanya dijadikan sebagai lumbung suara oleh klan politik tertentu untuk melegitimasi dan membuat tahan lama kekuasaan klan/keluarganya tersebut.

Munculnya bangunan politik klan sebagai sebuah paradoks dalam demokratisasi di Indonesia, khususnya di aras lokal tentunya secara tidak langsung berdampak pula pada bangunan-bangunan lain yang sudah terbentuk sebelumnya akibat proses demokratisasi ini. Salah satunya adalah partai politik, yang banyak ahli menganggap fitur dasar demokrasi menjadi sebuah sistem yang dapat dilembagakan melalui sebuah proses dimana warga memilih kader mereka untuk jabatan publik melalui pemilihan umum dan lawan politik mereka sebagai oposisi, dimana hal ini menjelaskan pembangunan dan kinerja partai politik merupakan bagian integral

⁴²Herien Puspitawati, "Konsep Dan Teori Keluarga", *Skripsi*, (Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2012) H.4

untuk memahami prosesdemokrasisecara keseluruhan. Artinyaketika kita berbicara mengenai demokratisasi yakni sebuah proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di sebuah negara, maka kita tidak bisa tidak harus melihat partai politik sebagai sebuah bangunan penting untuk melihat kinerja dan proses demokrasi yang terjadi.⁴³

Dalam wawancara saya dengan kepala desa Julukanaya, Ilyas Dg Gau juga mengatakan bahwa:

“Saya dengan para penambang sudah pasti ada hubungan keluarga, karena salah satu dari penambang itu termasuk keluarga dekat saya, dan saya juga tidak bisa pungkiri bahwa semua masyarakat desa Julukanaya itu keluarga saya”⁴⁴

Dalam hasil wawancara peneliti dengan seorang pengusaha tambang dan kepala desa Julukanaya dengan itu peneliti dapat mengatakan kalau antara penambang dengan pemerintah desa memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat. meskipun pemerintah desa dan pengusaha tambang tidak bicara terlalu dalam pada wawancara. Akan tetapi dari pengusaha tambang dan pemerintah desa mengakui adanya hubungan keluarga diantara mereka

2. Penambangan pasir sebagai praktek pemburuan rente

Didik J Rachbini mengemukakan bahwa dalam kajian ekonomi politik rent seekingmerupakan perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk

⁴³Muhammad Ridha T.R, “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. 2 No. 1, April 2016), H.163-165

⁴⁴Ilyas Dg Gau, Kepala Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 21 Juli 2017 Pukul 11.00 Wita

mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Menurutnya, perburuan rente (*rent seeking*) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (*rent seekers*). Praktek berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan Parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor produk barang yang merupakan bagian dari praktik perburuan rente ekonomi.⁴⁵

Dalam teori ekonomi politik *rent seeking*, penambangan pasir besi disini merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pemerintah untuk memperoleh keuntungan dari penambangan pasir besi ini. Pasir yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi kepentingannya mendapatkan suatu keuntungan.

⁴⁵ Ratnia Solihah, "Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking", *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016), H. 42

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan ekonomi politik pertambangan yang di tuturkan oleh Dg.siwa sebagai salah seorang penambang mengatakan bahwa:

“Dalam usaha yang dilakukan yakni penambangan pasir tidak terdapat campur tangan pemerintah tetapi mereka melakukan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan tersendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya”⁴⁶

Berdasarkan konsep ekonomi, laba diperoleh dengan pola investasi modal, keahlian dan berbagai investasi sumber daya yang mengandung resiko kerugian. Sementara upah merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh karena seseorang bekerja berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Sedangkan sewa atau rente merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh dari sewa atas modal (uang, mesin, rumah, dan lain-lain) yang merupakan hak milik sendiri. Sedangkan dalam konsep politik, pelibatan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dilakukan dengan asumsi bahwa sektor swasta lebih efisien dibanding pemerintah. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 membuktikan betapa swasta Indonesia ternyata lebih rapuh dibanding pemerintah.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan ekonomi politik pertambangan yang di tuturkan oleh Dg siwa sebagai salah seorang penambang mengatakan bahwa:

“Dalam usaha yang kami lakukan kami menggunakan modal sendiri, dan dengan usaha ini kami juga bisa membantu keluarga dan

⁴⁶ Dg.Siwa, Pengusaha Tambang , *Wawancara*, Julukanaya Tgl 12 Juli 2017 Pukul 10.00 Wita

masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan untuk bisa bekerja untuk menafkahi keluarga mereka.”⁴⁷

Dalam proses penambangan di Desa Julukanaya setiap yang punya modal sudah pasti berkuasa karena mereka bisa membeli lahan yang ada didekat tambang sehingga mereka bisa memperluas lokasi tambang dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Berbagai praktek konspirasi antara pengusaha dan penguasa tumbuh subur terutama pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru. Banyak kebijakan ekonomi dikeluarkan rezim Soeharto dengan menggunakan justifikasi ”demi kepentingan nasional”, padahal kebijakan tersebut sejatinya hanya demi menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya distorsi dan inefisiensi dalam kehidupan ekonomi. Gejala konspirasi di antara pengusaha dan penguasa, dalam kajian ekonomi politik, disebut dengan istilah perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*).⁴⁸

Pola relasi antara aktor ekonomi (pebisnis) dan aktor politik/pemerintahan (politisi/ birokrat) di masa reformasi masih memperlihatkan terjadinya pola transaksional yang bersifat pre-datoris dan bersifat patron-klien, yang dilakukan untuk mendapatkan *rent* dari pemerintah. Kondisi tersebut mirip dengan yang terjadi di masa Orde Baru. Adanya persamaan tersebut merupakan bentuk keberlanjutan atas kondisi di jaman Orde Baru yang masih diwariskan hingga saat ini.

⁴⁷Dg.Siwa, Pengusaha Tambang, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 12 Juli 2017 Pukul 10.00 Wita

⁴⁸Rizky Arie Kurniawan, “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung”, *Skripsi*, (Bandar Lampung:Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,Universitas Lampung,2017), H.30-31

Dalam relasi tersebut, karakter relasi patron-klien antara aktor bisnis dengan aktor pemerintah dilakukan dengan pola hubungan yang bersifat informal dan individu. Hal tersebut dilakukan aktor bisnis untuk mendapatkan sejumlah perlindungan, konsesi, dan proyek yang diberikan pemerintah. Para aktor bisnis yang merupakan kapitalis mencari peluang untuk menjadi penerima rente yang diberikan pemerintah dengan menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi, atau memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu yang diaturnya. Praktek bisnis dan politik tersebut dinamakan dengan *rent seeking* (pemburu rente).

Rent seeking di masa reformasi dalam prakteknya melakukan transformasi melalui perubahan rezim, dari rezim pemerintahan masa Orde Baru yang otoriter ke rezim pemerintahan di masa reformasi yang demokratis. Dalam proses transformasi tersebut, perilaku *rent seeking* ini berkembang karena ada kerjasama saling menguntungkan antara pemburu rente (pebisnis) di sektor ekonomi dengan kaum predator pembuat kebijakan di sektor publik (politisi, pemerintah, birokrat), yang tidak hanya di kalangan aktor ekonomi dan aktor politik/pemerintah pada tingkat pusat tetapi juga meluas ke Daerah dalam lingkungan politik/pemerintahan yang desentralistis.⁴⁹

Adapun hasil wawancara yang terkait dengan ekonomi politik pertambangan yang di tuturkan oleh Ilyas Dg Gau sebagai kepala desa julukanaya mengatakan bahwa:

⁴⁹Ratnia Solihah, Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking, *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016), H.46-47

“Kami tidak pernah menerima pajak kontribusi dari usaha tambang tersebut atau kontribusi dari mobil truk pengangkut hasil tambang karena kami sudah menganggap bahwa pertambangan itu illegal dan sudah menganggap usaha tersebut sudah dihentikan Karena pemerintah telah melaporkan kepada yang berwajib”.⁵⁰

Menurut kepala desa Julukanaya mereka sudah melaporkan kepada yang berwajib akan tetapi tidak tindak lanjut dan pemerinth desa juga mengatakan tidak pernah mengambil uang kontribusi, akan tetapi dimana uang kontribusi yang di bayar oleh supir truk pengangkut hasil tambang.

Perekonomian merupakan komponen utama bagi setiap Negara. Tanpa perekonomian, tidak mungkin suatu Negara dapat menjalankan urusan kenegaraan, seperti politik, administrasi, militer, atau pengadilan dengan baik. Poitik ekonomi bagi setiap Negara wajib ditegakkan di atas keseimbangan antara pemasukan dan pengeluarannya, atas dasar hal ini, daulah islamiyah mendirikan baitul mal untuk memelihara, mengatur, dan menggunakan pemasukan Negara untuk kemaslahatan umum umat islam. Ada beberapa sumber pemasukan daulah islmiyah saat itu, di antaranya adalah pajak, zakat (sepersepuluh dari harta), ganimah, upeti, dan fa'i.

Para sejarawan berbeda pendapat mengenai ketentuan pajak yang diberlakukan daulah islamiyah. Sebagian mereka berpendapat bahwa pajak perkapita dibebankan kepada ahli dzimmah. Sebagian lagi berpendapat bahwa pajak dibebankan kepada pemilik tanah. Namun, pajak bukanlah pemasukan tetap Negara, sebab sedikit-

⁵⁰Ilyas Dg Gau, Kepala Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 21 Juli 2017 Pukul 11.00 Wita

banyaknya pajak tanah bergantung kepada seberapa fasilitas yang digunakan untuk pengelolaan tanah, seperti irigasi dan jembatan.⁵¹

Manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup, dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang masyarakat disekitar pertambangan sebagai responden pada hari Senin tanggal 15 juli 2017, penulis memperoleh data sebagai berikut:

1. *Johari Dg Rampu umur 48 tahun, meskipun saya melihat beberapa jalan sudah rusak termasuk di depan rumah akan tetapi mata pencaharian utama sebagai penjual makanan di sekitar tambang sudah menjadi usaha atau pekerjaan yang sangat membantu untuk memenuhi kehidupan saya.*
2. *Dg. Situ umur 30 Tahun, saya tau apa yang saya lakukan yakni dengan menggali tanah atau pasir dapat mengakibatkan longsoran tetapi biar bagaimana usaha tersebut akan terus berjalan sehingga saya juga memilih untuk bekerja sebagai*

⁵¹Prof, Dr. Rosihon Anwar, M.Ag, *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hal.300

⁵²Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Hlm. 4.

- tukang skop pasir ke truk meskipun gajinya cuma Rp 30.000 per truknya karena saya sudah tidak punya kerjaan yang lain.*
3. *Dg Kebo umur 73 Tahun, dengan adanya penambangan pasir yang tidak jauh dari rumahnya, Dg Kebo juga mendapatkan uang sebesar Rp,5.000 pertruknya dari pengusaha tambang karena mobil pengangkut pasir dari tambang keluar melewati tempatnya atau tanahnya.*⁵³

Dalam proses penambangan pasir di desa Julukanaya ada masyarakat yang diuntungkan akan tetapi lebih banyak yang dirugikan. Bagi yang bekerja disana menurut mereka penambangan tersebut membawa rezki bagi mereka akan tetapi masih warga yang merasakan dampak dari penambangan tersebut, khususnya masyarakat yang ada disekitar lokasi tambang.

Praktek *rent seeking* ini merupakan akar dari munculnya korupsi, dimana pola relasi pebisnis yang memburu rente dengan pemerintah yang membuat kebijakan, dalam prosesnya banyak menghasilkan kesepakatan yang berada di luar struktur lembaga formal. Walaupun sistem politik yang lebih terbuka atau demokratis telah dijalankan, namun dengan adanya kemudahan atau keterbukaan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam sektor publik, hal tersebut itu yang membuat praktek *rent seeking* tetap subur. Hal ini diperkuat dengan hasil studi dari Ari Kuncoro dalam tulisannya yang berjudul '*Corruption and Business Uncertainty in Indonesia*' menjelaskan bahwa perilaku *rent-seeking* berfokus pada penyuapan dan *market* dari produk-produk regulasi pemerintah, seperti izin bisnis, inspeksi keselamatan kebakaran, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, penilaian pajak daerah, pemberian izin, dan inspeksi kontrak lingkungan. Hal-hal yang menjadi perilaku *rent-*

⁵³ Masyarakat Desa Julukanaya, Wawancara, Julukanaya Tgl 15 Juli 2017 Pukul 10.00 Wita

seeking adalah lobi pemerintah untuk proyek tertentu, proteksi industrial, dan hak monopoli eksklusif.⁵⁴

Sesuai dengan paragraf di atas kepala desa Julukanaya dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Setahu saya kami dari aparat desa itu tidak pernah menerima uang sepeser pun, tapi mdak tau apakah diluar sana ada aparat desa yang menerima uang kontribusi dari pengusaha tambang. Dan setahu saya itu sudah tidak ada karena itu tidak pernah masuk di kas desa”⁵⁵

Dalam hal ini pemerintah desa seharusnya memberikan peringatan kepada para aparat pemerintah desa supaya mereka tidak menerima uang kontribusi dari pengusaha tambang, supaya para pengusaha tambang merasa tidak di beri izin untuk menambang, sehingga proses penambangan dapat dihentikan.

3. Upaya pemerintah

Ada beberapa pendapat dari parah ahli tentang definisi peran yang akan diuraikan untuk memperjelas makna peran, sehingga dapat dengan mudah memahami makna dari pada peran itu, yaitu sebagai berikut :

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Komarudin, bahwa peran (*role*) adalah: (a) bagian dari tugas utama yang harus

⁵⁴Ratnia Solihah, “Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking”, *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016), H.47

⁵⁵Ilyas Dg Gau, Kepala Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 21 Juli 2017 Pukul 11.00 Wita

dilakukan oleh manajemen; (b) pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; (c) bagian suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah tentang Desa pasal (1) ayat (5), yaitu: desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia; ayat (6), yaitu: pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ayat (7), yaitu pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa.

Dalam wawancara saya dengan kepala Desa Julukanaya, Ilyas dg gau juga mengatakan bahwa:

“saya selalu mengatakan kepada para petambang, yang tidak lain itu adalah keluarga kita, untuk tidak melakukan usaha yang dilakukan di tanah yang aktif tetapi lahan yang pasif, dan saya juga selalu mendorong mereka untuk mencari usaha-usaha yang baru agar tidak ada lagi eksploitasi yang bisa terjadi di Desa Julukanaya”⁵⁶

Pemerintah desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal (14) ayat (2) huruf (e dan f), yaitu: membina kehidupan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa; dan pasal (15) ayat (1) huruf (o), yaitu : mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Peran pemerintah desa dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten atau Kota. kepada Desa, rincian urusan pemerintahan Kabupaten atau Kota yang dapat diserahkan kepada Desa pada pasal (2) ayat (1), huruf, yaitu: (f) rekomendasi pemberian izin pertambangan rakyat di Desa, (g) pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

Strategi dalam pembinaan menurut Person, ada tiga macam yaitu (1) asas mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas, (2) asas mezzo, pembinaan dilakukan pada

⁵⁶Ilyas Dg Gau, Kepala Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 21 Juli 2017 Pukul 11.00 Wita

sekelompok (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan, (3) asas makro, pendekatan sistem besar perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan pasti ada pembinaan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Menurut Widjaja, Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.⁵⁷

Masyarakat di desa julukannya mengetahui adanya penambangan galian golongan C tetapi tidak mampu berbuat lebih jauh walaupun tambang tersebut tidak memiliki izin. Camat cenderung menganggap bahwa penambangan galian golongan C diserahkan tanggung jawab langsung kepala desa yang berada di lokasi masing-masing apalagi kepala desa dapat setiap saat melakukan pengecekan langsung di lokasi penambangan.

Sikap camat Pallangga terhadap penambangan di Kecamatan Pallangga dianggap tidak merespon kegiatan walaupun camat Pallangga mengetahui bahwa

⁵⁷Abdul Rahim, Jaelan Usman, Handam, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. II No. 1 April 2012), H.3-4

kegiatan penambangan galian golongan C di wilayahnya tidak resmi atau tidak memiliki izin tambang. Camat Pallangga tidak dapat melakukan upaya yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penambang liar atau mengusahakan proses penambangan legal sehingga penambangan tersebut dapat terkelola dengan baik, bukan hanya untuk pemenuhan bahan bangunan tetapi adalah untuk kemaslahatan bersama terutama masyarakat yang ada di sekitar wilayah penambangan.

Kepala desa maupun camat Pallangga cenderung melakukan pembiaran terhadap kegiatan penambangan liar di Kecamatan Pallangga. Ada kesan bahwa kepala desa maupun camat Pallangga belum mampu berbuat maksimal untuk memperlakukan penambang tersebut sebagai penambang liar secara hukum. Selain itu antara kepala desa dan camat Pallangga dianggap kurang melakukan komunikasi dalam melakukan pengawasan. Kepala desa menganggap bahwa dia sudah menyampaikan ke camat Pallangga sementara camat Pallangga menganggap itu adalah tanggung jawab teknis kepala desa karena berada di wilayahnya masing-masing.

Terlebih lagi sikap masyarakat terhadap kegiatan pertambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga dianggap kurang aktif. Warga masyarakat menganggap permasalahan pertambangan galian golongan C cukup disampaikan

kepada kepala desa saja sebagai pemerintah.⁵⁸ Hal ini jua diperjelas oleh kepala desa Julukanaya dalam wawancaranya yang menegaskan bahwa:

*“sebenarnya kami itu dari pemerintah desa dan masyarakat sudah sering melakukan pertemuan dan kami menyampaikan masalah tambang tersebut kepada kecamatan dan yang berwajib seperti kepolisian, akan tetapi itu cuma di tanggapi hanya beberapa hari, meskipun camat sudah menegaskan bahwa sudah tidak akan ada lagi, akan tetapi lama kemudian adaji lagi, bahkan kita pemerintah musuhan dengan masyarakat sedangkan mereka yang nikmtati, dan paling jeleknya kita sudah musuhan akan tetapi tambang tetap berjalan”.*⁵⁹

Pemerintah telah berusaha dalam menanggulangi hal ini dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan melaporkan kepada pihak berwajib. Kepala desa menganggap bahwa dia sudah menyampaikan ke camat pallangga sementara tidak ada tindak lanjut dari camat pallangga karena pemerintah kecamatan menganggap itu adalah tanggung jawab teknis kepala desa karena lokasi tambang berada pada wilayahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

⁵⁸Herman K, Muhlis Madani, Muchlas M. Tahir, “Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. V No. 2 Oktober 2015), H.144

⁵⁹Ilyas Dg Gau, Kepala Desa Julukanaya, *Wawancara*, Julukanaya Tgl 21 Juli 2017 Pukul 11.00 Wita

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari perspektif ekonomi politik fenomena eksploitasi penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya yang di bangun dalam basis-basis keluarga itu sebenarnya ada, karena rata-rata pengusaha tambang merupakan warga Desa Julukanaya yang mempunyai hubungan keluarga baik antara penambang maupun dengan pemerintah setempat.
2. Upaya pemerintah untuk menghentikan penambangan pasir golongan C di Desa Julukanaya antara lain memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan setelah pertemuan pemeritah langsung menyampaikan keluhan masyarakat Pemerintah Kecamatan Pallangga ataupun kepolisian. Kemudian yang kedua pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada para pengusaha tambang.

B. Implikasi Penelitian

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dari aspek penelitian maupun isi penelitian. Namun satu hal yang penulis ingin sampaikan bahwa penelitian

ini adalah hasil kerja yang maksimal yang mampu penulis lakukan. Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada aparat Pemerintah khususnya dalam hal ini Pemerintah Desa Julukanaya untuk selalu memberikan penyuluhan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Julukanaya terkhusus kepada para penambang yang tidak lain mempunyai hubungan keluarga dengan pemerintah desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Julukanaya untuk dapat memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi eksploitasi yang dapat membawa kerugian bagi masyarakat.
3. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar lebih tegas dalam menjalankan tugas agar tidak ada lagi penambangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Rahim, Jaelan Usman, Handam, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. II No. 1 April 2012)

Anwar, Rosihon. *Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Destianti, Kiki Rizki. "Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial – Ekonomi Masyarakat Didesa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang", *Skripsi* (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2012)

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Habiba, "Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Politik Klan H. Andi Masdar Pasmari)." *Skripsi* (Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar, 2016)

Harrison, Lisa. *Metode penelitian politik* (Jakarta: Kencana, 2009)

Herman K, Muhlis Madani, Muchlas M. Tahir, Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa, *jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. V No. 2 Oktober 2015)

Herien Puspitawati, "Konsep Dan Teori Keluarga", *Skripsi*, (Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2012)

Husna, Ayatul Asmaul, "Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar," *Skripsi* (Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013)

Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta

Kurniawan, Rizky Arie, "Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung." *Skripsi* (

Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung, 2017)

M. Nur, "Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros", *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014)

Muslim Mufti, M. Si, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Pratama, Harman Alif Suci "Analisis Peran Keluarga Masdar Pamar Dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar", *skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)

Ratnia Solihah, "Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking", *Jurnal Wacana Politik-Jurnal Ilmiah Deprtemen Ilmu Politik*, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016)

Ridha T. R., Muhammad "Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan", *jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Vol. 2 No. 1, April 2016)

Ruslina Elli, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal konstitusi*, (Volume 9, Nomor 1, Maret 2012)

Saputro, Dwihari, "Penambangan Pasir Liar Di Sungai Luk Ulo Dan Implikasinya Terhadap Integrasi Masyarakat." *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2013)

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2008)

Syafe'i Rachmat, *Al-Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Yustika, Ahmad Erani *Ekonomi Politik (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)* Cetakan I. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cambaya, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 08 September 1995, dari ayah yang bernama Manai dan ibu bernama Saniwati. Peneliti merupakan anak pertama.

Tahun 2001 memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Cambaya, kemudian pada Tahun 2007 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bajeng, dan pada tahun 2010 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bajeng dan lulus pada tahun 2013.

Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dengan jalur SNMPTN pada jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos), Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ekonomi Politik Terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir Golongan C Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” dibawah Bimbingan Bapak Prof. Dr. Muh.Saleh Tajuddin, M.Ag dan Ibu Ismah Titah Ruslin, S. IP, M.Si.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a light green watermark in the background. It features a stylized mosque dome with a central yellow star containing the year '1965'. Below the dome is an open book. The text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR' is printed in a light green serif font at the bottom of the page.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lokasi Tambang di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Wawancara dengan pemilik lahan yang dilewati penambang



Wawancara dengan Pengusaha Tambang



Wawancara dengan Pengusaha Tambang



Wawancara dengan Pekerja Tambang



Wawancara dengan Masyarakat Seitar Tambang



Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Tambang



